

**ANALISIS PENENTUAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH JENIS KOMPUTER DI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Aulia Dian Fiquraisin
Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada
adfiquraisin@gmail.com

Irwan Taufiq Ritonga
Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada
abangupik@yahoo.com

ABSTRAK

Standarisasi kebutuhan barang milik daerah (BMD) merupakan faktor penting dalam perencanaan kebutuhan BMD, yaitu tahapan pertama dalam siklus pengelolaan BMD. BMD merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola secara tertib dan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar, tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam APBD, alokasi belanja modal BMD jumlahnya cukup signifikan, hal ini disebabkan setiap program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan BMD, seperti: tanah, bangunan, komputer dan lain-lain. Kebutuhan BMD jenis komputer di Pemda DIY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat hingga mencapai RP128.807.516.659,00. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah DIY memerlukan sebuah kebijakan atau regulasi terkait dengan standar kebutuhan BMD sehingga terjadinya kekurangakuratan dalam menghitung kebutuhan BMD jenis komputer di Pemda DIY dapat dihindari. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penentuan standar kebutuhan BMD jenis komputer di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan desain kasus tunggal dan memergunakan beberapa unit analisis, yaitu sebanyak 41 OPD di Pemda DIY. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan data primer yang berasal dari pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, survei melalui kuesioner dan *online* melalui *google-formulir* serta wawancara. Lingkup penelitian ini adalah Sekretariat OPD di seluruh Pemda DIY. Sekretariat ini terdiri dari tiga Subbagian, yaitu Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk menganalisis penentuan standar kebutuhan BMD jenis komputer di Pemda DIY dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1) menentukan pemicu kebutuhan BMD; 2) menentukan kewajaran kebutuhan BMD, dan 3) menentukan standar BMD.

Kata kunci: standar kebutuhan, perencanaan kebutuhan, pemicu kebutuhan, BMD.



Analisis Penentuan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jenis Komputer di Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta

AULIA DIAN F., Irwan Taufiq Ritonga, S.E, M.Bus, Ph.D., CA

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>